

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN TERHADAP PENGIRIMAN BARANG TERLARANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS

NI LUH SINTYA PRASTIKA YUNDI

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati
Denpasar

Email : sintyaprastika08@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji tentang perlindungan hukum dan pertanggungjawaban perusahaan jasa pengiriman barang terhadap pengiriman barang terlarang dalam perspektif undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang POS . Metode penelitian ini hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil penelitian tentang pengaturan jenis-jenis barang terlarang yang dimuat dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS belum jelas, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah saat ini sifatnya adalah perlindungan hukum yang represif serta pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman tertuang dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang POS

Kata Kunci : *Barang terlarang, Perlindungan hukum, Pertanggungjawaban*

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the legal protection and responsibility of freight forwarding service companies for the delivery of prohibited goods in the perspective of law number 38 of 2009 concerning POS. This research method is normative law with a statutory approach and a fact approach. The results of research on the regulation of the types of prohibited goods contained in Article 32 paragraph (2) letter f of Law Number 38 of 2009 concerning POS are not yet clear, the form of legal protection provided by the current government is repressive legal protection and limited accountability. must be carried out by the delivery service company contained in article 47 of Law Number 38 of 2009 Concerning POS.

Keywords: *Prohibited goods, Legal protection, Accountability*